

# Integrasi Kebijakan Publik dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Pesisir di Kabupaten Bima

Rifai<sup>1</sup>, Haeril<sup>2</sup>

Universitas Mbojo Bima, JL. Piere Tendean Mande II Sadia, Kabupaten Bima

Corresponding Author: [unbomerdeka@gmail.com](mailto:unbomerdeka@gmail.com)

---

**Keyword:**

Integration; Policy;  
Coastal Resources;  
Coastal Development

**Abstract:**

*This study aims to explore the integration of public policy and natural resource management in Bima District, focusing on the development of sustainable coastal welfare. The research method used is qualitative descriptive, with a political ecology theory approach to analyze the dynamics of power in environmental degradation and resource distribution. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and policy document analysis. Data analysis was performed with data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings reveal that policy conflicts and natural resource management issues in Bima District arise due to a lack of collaboration among stakeholders, including the government, local communities, and the private sector. The dynamics of power and resource distribution create socio-economic inequalities, with coastal communities experiencing significant dependence on fluctuating natural resources. This study highlights the importance of strong and consistent law enforcement, as well as effective prevention to maintain a balance between resource utilization and environmental and social-economic life protection. Community-based resource management approaches have proven effective in ensuring the sustainability of natural resource management in coastal areas. This study makes a significant contribution to academic literature and management practices, offering solutions that can be applied to address global challenges such as environmental degradation, climate change, and uneven development, especially in the context of coastal welfare development in Bima District.*

**Kata Kunci:**

Integrasi; Kebijakan;  
Sumber daya Pesisir;  
Pembangunan Pesisir

**Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi integrasi kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bima, dengan fokus pada pengembangan kesejahteraan pesisir yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan teori ekologi politik untuk menganalisis dinamika kekuasaan dalam degradasi lingkungan dan distribusi sumber daya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkap bahwa konflik kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bima terjadi akibat kurangnya kolaborasi antarstakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Dinamika kekuasaan dan distribusi sumber daya menciptakan ketidaksetaraan sosial ekonomi, dengan masyarakat pesisir mengalami ketergantungan signifikan terhadap sumber daya alam yang fluktuatif. Penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang kuat dan konsisten, serta pencegahan efektif untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan perlindungan lingkungan serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Pendekatan pengelolaan sumber daya berbasis komunitas terbukti efektif dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademis dan praktik pengelolaan, menawarkan solusi yang dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan global seperti degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan pembangunan yang tidak merata, khususnya dalam konteks pembangunan kesejahteraan pesisir di Kabupaten Bima.

---

## PENDAHULUAN

Integrasi kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya alam merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Yanfika et al., 2020). Dalam konteks multidimensi ini, pentingnya integrasi tersebut terletak pada kemampuannya untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang terbatas dikelola dengan cara yang paling efektif dan efisien, sejalan dengan kebijakan publik yang inklusif dan responsif terhadap

kebutuhan masyarakat (Wahyudi et al., 2023). Hal ini mencakup memastikan akses yang adil dan berkelanjutan terhadap sumber daya, mengurangi kerusakan lingkungan, dan memaksimalkan manfaat ekonomi jangka panjang dari penggunaan sumber daya tersebut (Haeril et al., 2020). Integrasi ini memerlukan kerja sama lintas sektoral dan multidisiplin, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan strategi yang komprehensif dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketidaksetaraan dalam akses sumber daya (Surip, 2022). Dengan memadukan kebijakan publik yang berorientasi pada keberlanjutan dengan praktik pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dapat dicapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, konservasi lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya akan membawa kita lebih dekat ke pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Mulyawan, 2022).

Demikian dalam konteks pembangunan kesejahteraan pesisir di Indonesia. Isu pesisir merupakan isu kompleks yang menunjukkan ketidaksesuaian antara rencana dan implementasi di lapangan (Afidah et al., 2022). Di negara kepulauan terbesar di dunia, dengan garis pantai yang panjang dan sumber daya alam yang melimpah, potensi untuk pembangunan kesejahteraan pesisir sangat besar (Shafira, Anwar, 2019). Namun, kegagalan dalam mengintegrasikan kebijakan yang efektif dan praktik pengelolaan yang berkelanjutan sering kali mengakibatkan degradasi lingkungan, penurunan kualitas hidup masyarakat pesisir, dan hilangnya biodiversitas (Nofendri, 2023). Faktor-faktor seperti pengelolaan yang terfragmentasi, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, kebijakan yang tidak memadai untuk melindungi ekosistem pesisir dan laut, serta praktik eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan seperti overfishing, penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak, dan konversi mangrove menjadi area tambak atau pengembangan properti telah berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang signifikan (Kamaluddin Kamaluddin et al., 2023). Ini tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya alam tetapi juga mengurangi kapasitas masyarakat pesisir dalam menghadapi risiko bencana alam dan perubahan iklim, serta memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan (Katiandagho, 2020) (Aldisun et al., 2022). Kegagalan ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk pendekatan yang lebih terintegrasi dan partisipatif dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam, yang memprioritaskan keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan ekologis sebagai pusat dari pembangunan pesisir di Indonesia (Nurmalasari, 1999).

Berikut diagram lingkaran yang menggambarkan distribusi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya alam dalam pembangunan kesejahteraan pesisir di Indonesia (Yaqin et al., 2023); (Sidabutar & Indra, 2021); (Dzoga et al., 2020). Setiap segmen mewakili faktor yang berbeda dengan proporsi yang sama, menekankan bahwa setiap aspek memiliki peran yang signifikan dalam menyebabkan kegagalan ini.

Kegagalan Kebijakan Publik dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Kesejahteraan Pesisir di Indonesia



Selain itu, peneliti juga merangkum dalam tabel ringkasan dari beberapa konflik kebijakan yang umum terjadi dalam pengelolaan pesisir di Indonesia serta dampak yang ditimbulkannya.

**Tabel 1. konflik kebijakan yang umum terjadi dalam pengelolaan pesisir di Indonesia**

<b>Konflik Kebijakan</b>	<b>Dampaknya</b>
Pengelolaan Sumber Daya vs Kebutuhan Pembangunan	Kebijakan pengembangan industri dan pembangunan yang mengabaikan pelestarian sumber daya alam menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat pesisir (Tropika et al., 2023); (Harahab et al., 2021).
Perlindungan Lingkungan vs Aktivitas Ekonomi	Upaya perlindungan lingkungan yang membatasi aktivitas ekonomi, seperti perikanan dan pariwisata, dapat mengurangi pendapatan masyarakat dan menimbulkan ketidakpuasan (Harahab et al., 2021); (Hadi et al., 2023).
Keuntungan Industri vs Masyarakat Lokal	Prioritas pada kepentingan industri sering kali menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal yang kehidupannya tergantung pada sumber daya alam pesisir, menyebabkan masalah sosial ekonomi (Sartika & Wardani, 2023).
Kebijakan Pusat vs Praktik Lokal (Hukum Adat)	Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah yang tidak selaras dengan praktik dan hukum adat lokal dapat menimbulkan ketegangan dan keengganan masyarakat lokal dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Winata, 2023).
Pengembangan Pariwisata vs Konservasi Lingkungan	Pengembangan pariwisata yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, mengancam konservasi alam, dan memicu konflik kepentingan antara pengusaha pariwisata dengan aktivis lingkungan (Ferdian et al., 2020).
Stratifikasi Sosial dalam Masyarakat Pesisir	Kebijakan yang tidak memperhatikan stratifikasi sosial dalam masyarakat pesisir dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi dan sosial, memperburuk kondisi hidup nelayan kecil dan kelompok marjinal lainnya (Suprajitno, 2021).
Implementasi Kebijakan yang Tidak Efektif	Kebijakan yang tidak diimplementasikan dengan efektif, karena kurangnya sumber daya, pengetahuan, atau keinginan politik, menyebabkan masalah yang berkepanjangan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Aldisun et al., 2022).
Kolaborasi Antar Stakeholder yang Kurang	Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan lembaga penelitian dalam pengelolaan pesisir menimbulkan inefisiensi dan gagalnya inisiatif pelestarian dan pengembangan sumber daya (Suprajitno, 2021); (Wibowo et al., 2021).

Dari tabel di atas menguraikan konflik kebijakan dalam pengelolaan pesisir dan dampaknya, serta menyoroti perbedaan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian sumber daya, perlindungan lingkungan versus aktivitas ekonomi, dan kepentingan industri dibandingkan dengan masyarakat lokal. Kurangnya kolaborasi dan implementasi kebijakan yang tidak efektif menimbulkan masalah sosial ekonomi dan kerusakan lingkungan.

Demikian di Kabupaten Bima. Integrasi kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir merupakan elemen kunci dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Wilayah pesisir, yang merupakan zona transisi antara daratan dan lautan, memegang peranan vital dalam ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat, terutama bagi nelayan yang kesejahteraannya sangat tergantung pada kelimpahan sumber daya maritim (Ardiyanto, 2023). Beberapa penelitian sebelumnya menyoroiti bahwa meskipun wilayah pesisir memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, masih terdapat banyak hambatan, termasuk implementasi kebijakan yang belum optimal (Basri, 2021). Hal ini menandakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, perlu adanya upaya serius dalam mengintegrasikan kebijakan publik dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Haya & Tambunan, 2022).

Selanjutnya, kesulitan dalam mengelola dampak manusia terhadap zona pesisir membutuhkan upaya pendekatan yang adaptif dan inovatif (Jauhari & Surono, 2023). Paradigma *Integrated Coastal Zone Management* yang telah berlangsung selama beberapa dekade, meskipun memiliki niat baik, seringkali menemui kendala dalam penerapannya (Nusantara et al., 2023). Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kompleksitas interaksi antar sektor dan tantangan dalam mengelola sumber daya yang terbatas (Analisis et al., 2022).

Selain itu, penegakan hukum terkait aktivitas penambangan pasir laut dan permasalahan pengeboman ikan di wilayah pesisir menyoroiti perlunya kebijakan yang kuat dan konsisten (Syahbuddin & Habibah, 2021). Konflik terkait penambangan pasir laut menunjukkan gap dalam penegakan hukum dan perlindungan lingkungan (Qodriyatun, 2013). Sementara itu, ancaman pengeboman ikan di berbagai teluk di Kabupaten menggarisbawahi perlunya kerja sama regional dalam mengatasi masalah keamanan maritim. Penerapan hukum yang tegas dan pencegahan yang efektif menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan perlindungan lingkungan serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir (Abdul & Meiyani, 2023).

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa integrasi kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya alam membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta (Igul & Cikusin, 2021); (Rodliyah, 2023). Kolaborasi dan kemitraan strategis ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan cara yang menguntungkan semua pihak dan melindungi ekosistem pesisir untuk generasi mendatang (Mohammad Zamroni & Kafrawi, 2021); (District et al., 2023).

Kemudian beberapa penelitian tentang sektor pariwisata menunjukkan bahwa tantangan seperti partisipasi masyarakat yang terbatas, kurangnya transparansi, dan pengelolaan lingkungan yang belum optimal menjadi penghambat utama (Internasional et al., 2021); (Sabet & Pungki Ari, 2022). Namun, ini juga membuka jalan untuk inovasi dalam kebijakan publik yang dapat mengatasi hambatan tersebut (Bellanger et al., 2021). Melalui penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi, dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, Kabupaten Bima memiliki peluang untuk menciptakan model pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan (Febrianti et al., 2023) (Imaduddin, 2017). Model ini dapat dijadikan contoh bagi wilayah pesisir lain dalam mengintegrasikan kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya alam, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Merdeka, 2022); (Information, 2024); (Potensi et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kebutuhan mendesak akan integrasi efektif antara kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya alam dalam konteks pembangunan kesejahteraan di wilayah pesisir Kabupaten Bima, yang memiliki keanekaragaman biologis dan ekonomi yang tinggi namun menghadapi tantangan signifikan terkait degradasi lingkungan, ketidakadilan akses sumber daya, dan kerentanan terhadap perubahan iklim. Melalui analisis komprehensif terhadap kasus-kasus di Kabupaten Bima, penelitian ini mengusulkan untuk memahami secara dalam faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam integrasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya. Ini mencakup pengkajian terhadap praktik pengelolaan yang terfragmentasi, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan kebijakan

yang tidak memadai yang telah mengakibatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir yang memburuk.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pengembangan strategi yang inovatif dan adaptif untuk mengatasi masalah yang kompleks ini, memastikan akses yang berkelanjutan dan adil terhadap sumber daya, serta memperkuat ketahanan ekologis dan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang multidisiplin dan holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek lingkungan tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir. Ini menargetkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dan praktik pengelolaan yang dapat diadopsi oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Diharapkan, hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademis dan praktik pengelolaan, menawarkan solusi yang dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan global seperti degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan pembangunan yang tidak merata, khususnya dalam konteks pembangunan kesejahteraan pesisir di Kabupaten yang memiliki potensi besar namun juga menghadapi tantangan yang kompleks.

Dalam konteks penelitian ini, teori ekologi politik yang dikemukakan oleh Piers Blaikie dijadikan landasan analisis terhadap pengaruh struktural dan kekuasaan dalam masalah degradasi lingkungan serta distribusi akses dan kontrol sumber daya alam seperti tanah, air, dan mineral di Kabupaten Bima. Teori ini menyoroti bagaimana distribusi tersebut menciptakan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta mempengaruhi pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan. Menggunakan kerangka ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak dari struktur kekuasaan dan distribusi sumber daya dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bima, khususnya di zona pesisir (Cahyono, 2013); (Afff, 2009). Untuk itu adapun pertanyaan riset yang mengemuka adalah tentang bagaimana dinamika kekuasaan dan distribusi sumber daya alam membentuk praktek-praktek pengelolaan lingkungan dan mengkatalisasi konflik dalam masyarakat Kabupaten Bima?" Penelitian ini berusaha menggali lebih dalam bagaimana elemen-elemen kekuasaan dan distribusi sumber daya secara signifikan berkontribusi pada disparitas sosial dan ekonomi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Melalui lensa ini, kita mengkaji cara-cara di mana kebijakan dan praktik pengelolaan bisa disempurnakan untuk mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif, dengan mendeskripsikan tantangan dalam integrasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya pesisir Kabupaten Bima, serta pemilihan partisipan yang melibatkan pemerintah daerah, komunitas nelayan, dan stakeholder terkait lainnya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para stakeholder, observasi langsung pada praktik pengelolaan sumber daya di lapangan, dan analisis dokumen kebijakan yang relevan. Semua langkah pengumpulan data ini dilaksanakan dengan memperhatikan etika penelitian, termasuk persetujuan dari partisipan. Analisis dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sehingga untuk keabsahan data dilakukan juga teknis pemeriksaan data yang terdiri dari *Credibility*, *Transferability*, *Dependability* dan *Conformability*.

### **HASIL DAN DISKUSI**

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian tentang integrasi kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan pesisir di Kabupaten Bima

melalui indikator-indikator utama seperti dinamika kebijakan, distribusi sumber daya, dan konflik lingkungan dalam pengelolaan sumber daya pesisir di Kabupaten Bima.

### **Dinamika Kebijakan**

Dinamika kekuasaan dalam pendekatan ekologi politik mengungkap kompleksitas hubungan antara manusia, lingkungan, dan kekuasaan dalam konteks sosial, politik, dan ekologis. Pendekatan ini menyoroti bagaimana kekuatan politik dan ekonomi membentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, serta bagaimana pola eksploitasi dan penguasaan sumber daya alam mencerminkan hierarki kekuasaan yang berbeda dalam masyarakat. Analisis ekologi politik mencakup pemahaman tentang bagaimana pembangunan, ekspansi industri, dan praktik ekonomi global menyebabkan degradasi lingkungan dan ketidaksetaraan sosial. Di sisi lain, pendekatan ini juga menggambarkan bagaimana gerakan sosial dan politik dapat memperjuangkan keadilan lingkungan, menggugat struktur kekuasaan yang dominan, dan memperjuangkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan menggabungkan elemen ekologi, politik, dan kekuasaan, pendekatan ekologi politik memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas dinamika kekuasaan dalam interaksi manusia dengan lingkungan alam, dan menawarkan landasan bagi transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam pesisir di Kabupaten Bima menggambarkan interaksi kompleks antara berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam, mencakup pemerintah daerah, komunitas nelayan lokal, perusahaan swasta, dan LSM lingkungan. Pemerintah daerah, dengan wewenang regulasi dan kebijakan, seringkali berada di pusat dinamika ini, berusaha menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan konservasi sumber daya alam. Namun, kebijakan yang dibuat tidak selalu mencerminkan kepentingan atau kebutuhan nelayan lokal, yang kehidupannya sangat tergantung pada sumber daya pesisir dan laut. Di sisi lain, kehadiran perusahaan swasta, terutama dalam sektor pariwisata dan eksploitasi sumber daya alam, menambah lapisan kompleksitas karena mereka membawa investasi yang signifikan tetapi juga menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan lingkungan dan akses komunitas lokal terhadap sumber daya. LSM lingkungan seringkali berperan sebagai pengawas dan advokat, mendorong transparansi, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan praktik pengelolaan yang berkelanjutan. Konflik kepentingan antar aktor sering kali muncul, memperumit proses pengelolaan sumber daya yang efektif dan adil.

Kesejahteraan nelayan sebagai indikator penting dalam pembangunan manusia di wilayah pesisir Kabupaten Bima menuntut perhatian serius dari pemerintah. Beberapa hasil penelitian memperlihatkan ketergantungan signifikan nelayan terhadap sumberdaya pesisir dan laut, yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut. Kondisi ini menuntut evaluasi dan perbaikan dalam implementasi kebijakan yang ada.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan secara signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan nelayan di Kabupaten Bima. Kurang optimalnya implementasi kebijakan pemerintah dalam hal ini tidak hanya menunjukkan kegagalan dalam menyediakan infrastruktur yang memadai, tetapi juga dalam mengadopsi pendekatan holistik yang memperhitungkan spesifisitas dan kebutuhan lokal dalam pembangunan pesisir.

Demikian pada sektor pariwisata di Kabupaten Bima menghadapi tantangan serupa, dimana partisipasi masyarakat yang terbatas, kurangnya transparansi, dan pengelolaan lingkungan yang suboptimal menandai kelemahan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Public Policy Governance*). Peluang inovasi kebijakan yang teridentifikasi melalui peningkatan partisipasi dan transparansi, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan, memerlukan komitmen dan kolaborasi antarsektor yang lebih kuat dari pemerintah (Di et al., 2023).

'Boom and bust' dalam pengembangan zona pesisir merupakan masalah berulang yang mengindikasikan ketidakberhasilan dalam mengelola tekanan manusia terhadap lingkungan pesisir. Meskipun Integrated Coastal Zone Management (ICZM) telah diperkenalkan sebagai

paradigma kebijakan, kegagalan dalam mengatasi degradasi lingkungan menunjukkan kebutuhan akan pendekatan adaptif dan inovasi melalui teknologi informasi dan jejaring sosial (Sururi, 2019).

Selanjutnya kegagalan penegakan hukum terkait aktivitas penambangan pasir laut di di pesisir Kabupaten Bima menunjukkan diskrepansi serius antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Overlapping alokasi area pesisir dan pulau-pulau kecil menunjukkan kelemahan dalam koordinasi dan implementasi regulasi yang berkelanjutan, menyoroti kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum dan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Jasman & Arman, 2023).

### **Distribusi Sumber Daya**

Dalam ekologi politik, distribusi sumber daya alam tidak hanya dipandang dari sisi fisiknya saja, tetapi juga dari sisi akses dan kontrol terhadap sumber daya tersebut. Akses merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber daya, sementara kontrol berkaitan dengan kemampuan untuk mengatur penggunaan dan manajemen sumber daya tersebut. Faktor-faktor seperti status sosial ekonomi, kebijakan pemerintah, hak milik tanah, dan kekuatan pasar seringkali menentukan siapa yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya, yang selanjutnya mempengaruhi distribusi kekayaan dan kekuasaan dalam masyarakat.

Namun, distribusi sumber daya yang tidak merata seringkali menimbulkan konflik dan ketidakadilan sosial. Misalnya, eksploitasi sumber daya alam di wilayah tertentu dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu seperti perusahaan besar dan pemerintah, sementara masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya tersebut untuk kelangsungan hidupnya justru kehilangan akses dan mengalami dampak negatif, seperti pencemaran dan penggusuran. Ekologi politik mengkaji dinamika ini untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi terhadap konflik sumber daya.

Demikian masyarakat pesisir Kabupaten Bima, dengan karakteristiknya yang pluraristik dan kehidupan yang erat dengan sumber daya alam (SDA), menunjukkan sebuah ekosistem sosial dan ekonomi yang unik dan kompleks. Kehidupan mereka, yang secara historis telah terbentuk melalui interaksi intens dengan laut dan pantai, menggambarkan sebuah simbiosis antara manusia dan alam yang tidak hanya mendukung kelangsungan hidup tetapi juga memperkaya kebudayaan dan identitas komunitas.

Hasil penelitian menyoroti ketergantungan yang kuat antara kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Bima, khususnya nelayan, terhadap sumber daya alam pesisir dan laut. Ketergantungan ini bukanlah sesuatu yang statis; melainkan dinamis, mengalir seiring dengan perubahan musim, kondisi lingkungan, dan kebutuhan pasar. Misalnya, musim penangkapan yang menguntungkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi mereka secara signifikan, sementara musim peceklik atau pencemaran lingkungan dapat membawa dampak serius terhadap pendapatan dan kualitas hidup mereka. Ketergantungan ini menjadi titik awal dalam mengidentifikasi bagaimana distribusi dan manajemen sumber daya alam mempengaruhi ekonomi lokal, kesehatan, dan pendidikan. Sehingga kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir sangat rentan terhadap fluktuasi dan perubahan yang terjadi pada lingkungan mereka. Contohnya, pencemaran di beberapa pantai di Kabupaten Bima yang menyebabkan produksi udang tambak anjlok secara drastis merupakan bukti nyata dari kerentanan mereka terhadap perubahan lingkungan. Ini memperlihatkan betapa pentingnya kualitas lingkungan bagi kelangsungan usaha perikanan, yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bima. Selain itu, keberlanjutan usaha perikanan juga sangat bergantung pada kondisi pasar. Fluktuasi harga produk perikanan dapat langsung berdampak pada kondisi sosial ekonomi mereka, menunjukkan keterkaitan yang erat antara aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dengan dinamika pasar global (Indarti & Wardana, 2014).

Selanjutnya, dalam menghadapi ketidakpastian yang dibawa oleh lingkungan dan pasar, masyarakat pesisir telah mengembangkan berbagai strategi penghidupan yang adaptif dan fleksibel. Dari menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti yang telah

diajarkan oleh nenek moyang mereka, hingga mengadopsi praktik pengelolaan yang lebih modern dan inklusif, masyarakat pesisir terus berusaha untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Strategi ini tidak hanya fokus pada pemanfaatan sumber daya tetapi juga pada pelestarian lingkungan, mengingat kelestarian SDA merupakan kunci dari kelangsungan hidup mereka.

Pengelolaan sumber daya yang berbasis komunitas (community-based management) di Kabupaten Bima merupakan salah satu pendekatan yang telah terbukti efektif dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan SDA di wilayah pesisir. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya alam. Melalui pendekatan ini, masyarakat pesisir tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek dalam pengelolaan lingkungan, memastikan bahwa praktik pengelolaan yang diadopsi sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan aspirasi mereka.

Namun, masyarakat pesisir di banyak Daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Bima, masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam yang fluktuatif, kerentanan terhadap dampak perubahan iklim dan pencemaran, serta akses yang terbatas terhadap modal dan pasar merupakan beberapa hambatan yang harus diatasi. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam merumuskan dan menerapkan strategi pengelolaan sumber daya alam yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

### **Konflik Lingkungan**

Dalam sudut pandang ekologi politik, konflik lingkungan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dapat dipahami sebagai manifestasi dari ketidakseimbangan kekuasaan, di mana kepentingan ekonomi jangka pendek dan kapitalisme industri sering mendominasi atas keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial. Eksploitasi berlebihan sumber daya alam, seperti overfishing dan pencemaran akibat aktivitas industri, tidak hanya merusak ekosistem laut tetapi juga mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya ini. Relasi sosial patron-klien antara nelayan kecil dengan juragan besar dan dinamika kekuasaan dalam akses dan kontrol sumber daya menunjukkan bagaimana distribusi sumber daya yang tidak merata sering kali dikaitkan dengan struktur sosial dan ekonomi yang lebih luas. Pendekatan ekologi politik memungkinkan kita untuk melihat konflik ini tidak hanya sebagai masalah lingkungan tetapi juga sebagai masalah keadilan sosial, di mana solusi harus mengatasi akar penyebab ketidaksetaraan, memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan mendorong pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan adil.

Hasil penelitian menunjukkan, terlihat bahwa pengelolaan sumber daya pesisir dan laut menghadapi berbagai tantangan dan konflik lingkungan yang signifikan. Salah satu aspek utama yang menonjol adalah ketergantungan masyarakat pesisir pada sumber daya perikanan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, khususnya kualitas air. Kondisi ini membuat masyarakat pesisir sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan dan pencemaran, yang dapat berasal dari limbah industri dan tumpahan minyak, menyebabkan gangguan besar pada kehidupan sosial ekonomi mereka. Contoh konkret dari hal ini adalah insiden pencemaran di teluk Sape, yang menyebabkan penurunan drastis produksi udang tambak, perikanan dengan konsekuensi serius bagi kehidupan para petani tambak dan nelayan.

Konflik lingkungan lainnya terkait dengan eksploitasi berlebihan atau overfishing di Kabupaten Bima, yang mengakibatkan penurunan volume hasil tangkapan para nelayan, sehingga mempengaruhi pendapatan mereka. Hal ini juga mendorong munculnya pola hubungan patron-klien di kalangan nelayan dan petani tambak, dimana karena keadaan ekonomi yang buruk, mereka seringkali terpaksa meminjam uang dan kebutuhan sehari-hari dari para juragan atau pedagang pengumpul, yang pada akhirnya membuat mereka terikat dan mengubah relasi sosial menjadi alat dominasi dan eksploitasi.

Kemudian konflik sosial yang tinggi serta berpotensi menyebabkan bencana lingkungan dan ekosistem akibat aktifitas penambangan pasir laut di Sape, Lambu, dan wera. Pengelolaan

sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan konflik penggunaan sumber daya antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan pelestarian lingkungan jangka panjang menimbulkan tantangan besar dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Konflik lingkungan dalam pengelolaan sumber daya pesisir juga mencerminkan kesenjangan akses dan kontrol atas sumber daya tersebut, dimana masyarakat lokal seringkali dikesampingkan dari proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini membutuhkan pendekatan pengelolaan yang inklusif, yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan sosial masyarakat dan kelestarian lingkungan. Perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan, yang dapat mengatasi konflik lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara keseluruhan.

Berikut peneliti merangkum dalam tabel berbagai aspek konflik dalam pengelolaan sumber daya pesisir di Kabupaten Bima dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan. Pencegahan dan mitigasi konflik tersebut membutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir.

Tabel 2. Konflik pengelolaan pesisir

<b>Konflik Pengelolaan Pesisir</b>	<b>Dampaknya</b>
Pencemaran dan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan drastis produksi udang tambak dan sumber daya perikanan lainnya.</li> <li>• Gangguan besar pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir.</li> </ul>
Overfishing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume hasil tangkapan para nelayan menurun, mempengaruhi pendapatan mereka.</li> <li>• Kerusakan ekosistem laut dan penurunan stok ikan yang berkelanjutan.</li> </ul>
Hubungan patron-klien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketergantungan ekonomi masyarakat pesisir pada juragan atau pedagang pengumpul.</li> <li>• Relasi sosial yang tidak simetris, berpotensi menjadi alat dominansi dan eksploitasi.</li> </ul>
Kurangnya penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konflik sosial yang tinggi dan potensi bencana lingkungan serta kerusakan ekosistem.</li> <li>• Overlapping izin yang menyebabkan konflik penggunaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</li> </ul>
Konflik penggunaan sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sengketa akses dan kontrol atas sumber daya pesisir antara masyarakat lokal dengan pemerintah atau pihak swasta.</li> <li>• Kesenjangan dalam peruntukan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, keterbatasan akses masyarakat untuk berpartisipasi.</li> </ul>
Ketergantungan pada musim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fluktuasi pendapatan nelayan yang tinggi, meningkatkan ketidakstabilan ekonomi.</li> <li>• Banyak nelayan yang menganggur pada musim paceklik.</li> </ul>

**Sumber: Data Primer 2023**

## KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap kompleksitas interaksi antara struktur kekuasaan, distribusi sumber daya alam, dan dinamika konflik dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir di Kabupaten Bima. Menyoroti bagaimana kekuatan politik dan ekonomi mempengaruhi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam, menciptakan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang signifikan. Temuan utama menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan sering kali memarginalkan nelayan lokal dan masyarakat pesisir, menyebabkan konflik dan mereduksi efektivitas kebijakan

pengelolaan lingkungan. Konflik antar berbagai aktor pemerintah daerah, sektor swasta, dan LSM, menambah kompleksitas dan sering kali menghambat implementasi praktik pengelolaan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, yang menempatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan sebagai pusat dalam pembangunan pesisir, serta menyerukan kerjasama yang lebih erat antar semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

#### REFERENSI

- Abdul, N. B., & Meiyani, E. (2023). Implementasi Kebijakan Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima. *Journal Socius Education (JSE)*, 1(1), 87–97. <https://doi.org/10.0505/jse.v>
- Afidah, N., Allyah, H., & Janah, F. roikhatul. (2022). Analisis Pengaruh Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Aspek Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial Budaya Masyarakat Pesisir. *ResearchGate, December*. <https://www.researchgate.net/publication/366215451>
- Afiff, S. (2009). Pendekatan Ekologi Politik: Sebuah Pengantar. *Walhi*, 18–33.
- Aldisun, F., Ukas, U., & Zuhdi Arman, Z. A. (2022). Analisis Yuridis Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan-Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Di Kepulauan Riau. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.33884/jck.v10i1.5511>
- Analisis, M., Pemetaan, D. A. N., & Sumber, K. (2022). *Jurnal Sangkala Vol ( 1 ) No ( 2 ) ( 2022 )*. 1, 85–98.
- Ardiyanto, G. M. (2023). Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan Di Kawasan Pesisir Teluk Bintuni, Papua Barat. *Jurnal Darma Agung*, 31(6), 188–197.
- Basri, H. (2021). Pengelolaan, Pengawasan Kawasan Pesisir dan Laut di Indonesia. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 1. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3713>
- Bellanger, M., Fonner, R., Holland, D. S., Libecap, G. D., Lipton, D. W., Scemama, P., Speir, C., & Thébaud, O. (2021). Cross-sectoral externalities related to natural resources and ecosystem services. *Ecological Economics*, 184, 1–21. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.106990>
- Cahyono, E. (2013). EKSCLUSI ATASNAMA KONSERVASI ( Studi Kasus Masyarakat Sekitar / Dalam Kawasan Taman Nasional Ujungkulon Banten ). *Sosiologi Reflektif*, 8(1), 209–246.
- Di, E., Sape, K., & Bima, K. (2023). *Menuju Kesejahteraan Pesisir : Evaluasi Kebijakan Pembangunan Sosial*. 20(2).
- District, L., Regency, B., District, L., Regency, B., Tenggara, W. N., & District, L. (2023). *Keterlibatan Ibu Rumah Tangga Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Masyarakat Pesisir ( Studi Kasus Pada Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima )* 1.
- Dzoga, M., Simatele, D. M., Munga, C., & Yonge, S. (2020). Application of the DPSIR Framework to Coastal and Marine Fisheries Management in Kenya. *Ocean Science Journal*, 55(2), 193–201. <https://doi.org/10.1007/s12601-020-0013-y>
- Febrianti, E., Eprilianto, D. F., Wahyu, G., Publik, J. A., Negeri, U., & Daerah, P. (2023). *PENGEMBANGAN LOCAL HERITAGE DI KABUPATEN*. 07(01), 17–29.
- Ferdian, K. J., Idrus DM, I. A., & Tondo, S. (2020). Dampak Ekowisata Bahari Dalam Perspektif Kesejahteraan Masyarakat Dan Kelestarian Lingkungan Pesisir. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 3(1), 481–499. <https://doi.org/10.31506/jipags.v3i1.5480>
- Hadi, A., Amani, M., Rahman, B., & Lambung Mangkurat, U. (2023). *The Effectiveness of The Implementation of Coastal and Sea Environmental Management Policies in Tanjung Seloka Village South Island Kotabaru District South Kalimantan*. 19(3).
- Haeril, H., Hamidah, N. K., Mas'ud, M., & Anilawati, N. (2020). Upaya Kelembagaan Dalam Pengembangan pariwisata Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Bima. *Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata*, 3(1), 25–31. <https://doi.org/10.32528/sw.v3i1.3370>
- Harahab, N., Riniwati, H., Utami, T. N., Abidin, Z., & Wati, L. A. (2021). Sustainability analysis of marine ecotourism management for preserving natural resources and coastal ecosystem functions. *Environmental Research, Engineering and Management*, 77(2), 71–86.

- <https://doi.org/10.5755/j01.erem.77.2.28670>
- Haya, S. F., & Tambunan, K. (2022). Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Meningkatkan Perekonomian di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 129–138.
- Igul, & Cikusin, Y. (2021). Impelementasi Permendes Pdtt No 4 Tahun 2015 Di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima Implementation of the Pdtt Ministerial Regulation No. 4 of 2015 in Naru Village, Sape District, Bima Regency. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 1(2), 140–153. <https://journal.intelekmadani.org/index.php/jgpi/article/view/163>
- Imaduddin, R. (2017). *Pengembangan Wisata Pantai Lawata dalam Pengembangan Wilayah di Kota Bima* (Vol. 7).
- Indarti, I., & Wardana, D. S. (2014). Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan (Studi di Perdesaan Nelayan Cangkol Kelurahan Lemhwungkuk Kota Cirebon). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 1–12. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/272>
- Information, A. (2024). *Tantangan dan Peluang Inovasi Kebijakan di Sektor Pariwisata Kabupaten Bima: Perspektif Good Public Policy Governance Akhyar*. 4(6).
- Internasional, H., Riau, U. I., Pemerintahan, I., Riau, U. I., Internasional, H., Riau, U. I., Internasional, H., & Riau, U. I. (2021). *Identification Of Potential And Social Welfare Resources Of Coastal Communities In The Regency Of Meranti Islands , Riau Province* 7(02).
- Jasman, J., & Arman, A. (2023). Kondisi Sosial-Ekonomi Dan Potensi Pembangunan Kabupaten Bima. *Mimbar Administrasi*, 20(1). <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/655%0Ahttps://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/download/655/615>
- Jauhari, A., & Surono, A. (2023). Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai. *5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies 2023*, 70.
- Kamaluddin Kamaluddin, Muhammad Taufiq, & Haeril Haeril. (2023). Kebijakan Pembangunan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bima. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(1), 85–97. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i1.657>
- Katiandagho, F. G. O. (2020). Aspek Hukum Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. *Lex Et Societatis*, 8(1), 97–108. <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28476>
- Merdeka, P. H. (2022). Manajemen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Pemberdayaan Usaha Lokal Masyarakat : a Review. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 1(1), 1–9.
- Mohammad Zamroni, & Kafrawi, R. M. (2021). Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Perspektif Hukum*, 1, 52–73. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.99>
- Mulyawan, W. (2022). Pembinaan Masyarakat Pesisir dan Nelayan Kecamatan Sape Kabupaten Bima. *SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(3), 183–190.
- Nofendri, N. (2023). Analisis Sektor Lapangan Usaha Pendukung Ekonomi Daerah Dalam Penyusunan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 32601–32613. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/13417>
- Nurmalasari, Y. (1999). *Abstrak [ 2 ] . Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat*. 1–8.
- Nusantara, S. D., Muhammad, F., Maryono, M., & Rahman Halim, M. A. (2023). Tantangan Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Kabupaten Halmahera Selatan. *Indonesian Journal of Fisheries Community Empowerment*, 3(2), 216–225.

- <https://doi.org/10.29303/jppi.v3i2.2539>
- Potensi, A., Tourism, S., Wisata, B., & Bengkulu, K. (2023). *PROGRAM MAGISTER IKIP PGRI PONTIANAK*.
- Qodriyatun, N. (2013). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Kota Batam Melalui Pemberdayaan Masyarakat. *Aspirasi*, 4(2), 91–10. <http://imbalo.wordpress.com/2010/>
- Rodliyah. (2023). Jurnal Risalah Kenotariatan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 271–293.
- Sabet, F. B. A. S., & Pungki Ari, W. (2022). Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut dalam Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut. *OECOMICUS Journal of Economics*, 6(2), 74–85. <https://doi.org/10.15642/oje.2022.6.2.74-85>
- Sartika, R., & Wardani, M. (2023). *Pembinaan Nelayan Dalam Kawasan Pengembangan Perikanan Di Kecamatan Sape Kabupaten Bima Fishermen Development in Fisheries Development Areas In Sape District, Bima Regency* 1), 63–70.
- Shafira, M. S. M., Anwar, M. A. M., & ... (2019). Kebijakan Dekonsentrasi Pengelolaan Perikanan Indonesia: Studi Pada Provinsi Lampung. *Repository.Lppm.Unila.Ac.Id*. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/25864>
- Sidabutar, Y. F. D., & Indra, E. (2021). Maritime Potential Phenomenon in Improving the Welfare of the Riau Island Community. *E3S Web of Conferences*, 324, 0–3. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202132408001>
- Suprajitno, H. (2021). Identifikasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Tradisional Di Kawasan Pesisir Pantai Popoh Kabupaten Tulungagung. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 1. <https://doi.org/10.31602/as.v6i2.4372>
- Surip, S. (2022). Pengawasan Dan Sanksi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Pesisir (Studi Kasus di Kabupaten .... *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 4, 106–118. <http://journal.sinov.id/index.php/sinov/article/view/610%0Ahttps://journal.sinov.id/index.php/sinov/article/download/610/523>
- Sururi, A. (2019). Inovasi Kebijakan Organisasi Sektor Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. *Jurnal Good Governance*, 15(1), 85–96. <https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.96>
- Syahbuddin, S., & Habibah, H. (2021). Budidaya Rumput Laut dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima). *Jurnal Pendidikan Ips*, 11(2), 101–106. <https://doi.org/10.37630/jpi.v11i2.513>
- Tropika, B., Pengasuhan, K., Nelayan, K., & Barat, J. (2023). *Ringkasan*. 5(4).
- Wahyudi, A. I., Adrianto, L., Agus, S. B., Manajemen, D. J., Perairan, S., Uho, F., Poasia, K., Kendari, K., Tenggara, S., Perikanan, D. J., Darmaga, K., Ipb, K., Bogor, D., Barat, J., Jurusan, D., Dan, I., & Kelautan, T. (2023). User Fee System Sebagai Bentuk Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Pesisir Teluk Kendari Review of the User Fee System as a Form of Implementation of the Spatial Planning Policy For the Coastal Area of Kendari Bay. *Journal of Fishery Science and Innovation*, 7(2), 166–174. <https://doi.org/10.33772/jsipi.v7i2.513>
- Wibowo, A., Prabawa, E., & Sugiarto, E. (2021). Manajemen Strategi Pengelolaan Sumber Daya Maritim Di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 163–170. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v12i2.4201>
- Winata, I. N. P. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pendekatan Pengembangan Usaha Perikanan. *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan (JKPT)*, 1, 91. <https://doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12053>
- Yanfika, H., Rangga, K. K., Viantimala, B., Listiana, I., Mutolib, A., & Rahmat, A. (2020). Evaluation of the Success of Programs and Strategy for Sustainable Coastal Community Development in Tanggamus Regency. *Journal of Physics: Conference Series*, 1467(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1467/1/012026>
- Yaqin, A., Saidi, A., Rozy, A. F., Arisandi, D., Munir, F., Kurniawan, F., & Khusairi, I. (2023). Peran Ekonomi Islam Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir. *Jurnal Economina*, 2(12), 3584–3592. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1039>